Chris Wibisana

Dari Atas Batu Karang Ini

Apologetika dalam Delapan Babak

Juni 2024

"Ia telah membuat mulutku pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangan-Nya.

Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panah-Nya."

(Yesaya 49: 2)

1.

Tulisan ini disusun menanggapi tulisan Saudara Nandito Oktaviano berjudul "Katolisisme dan Pancasila Orde Baru: Perkawinan Teologi Politik", yang dimuat *Kontekstual* pada 31 Mei 2024. Namun, berbeda dengan tulisan Saudara Nandito yang ditulis sebagai opini tanpa tujuan jelas kecuali usaha eksplisit untuk mencoreng sejarah "Katolisisme"—istilah yang dia gunakan dan akan saya kritisi—di Indonesia, khususnya pada masa dan setelah Orde Baru, **tulisan ini adalah sebuah apologetika**. Dalam khazanah Gereja Katolik, apologetika merupakan uraian sistematis yang disusun untuk mempertahankan pendirian terhadap serangan atas prinsip ajaran Gereja.

Dengan menjunjung semangat apologetika, tulisan ini mempunyai tiga tujuan: sebagai *jawaban* untuk pandangan Saudara Nandito yang berpretensi ilmiah melalui cara pengutipan sumber-sumber akademik dalam tulisannya; sebagai *koreksi* untuk salah kaprah Saudara Nandito yang bertaburan merata sejak kalam pertama sampai terakhir artikel tersebut; dan sebagai penjelasan yang mengarahkan pembaca yang budiman untuk memeriksa penjelasan-penjelasan dalam tubuh tulisan ini selayaknya seorang arifin.

Sebagai penafian, apologetika ini disusun oleh seorang **awam** anggota Gereja Katolik Roma, penganut ajaran Iman Katolik, tetapi tanpa berpretensi merepresentasikan pandangan institusional Gereja Katolik. Bias yang akan didapati di dalam tulisan ini adalah ekspresi personal, yang sedapat-dapatnya penulis pertanggungjawabkan secara pribadi. Kebijaksanaan pembaca dalam mencerna tulisan ini amat diharapkan. Guna mempermudah pemahaman, pada bagian sebelum daftar pustaka, tercantum glosarium istilah selingkung dalam Gereja Katolik di dalam tulisan ini, untuk memudahkan pemahaman pembaca yang memiliki latar belakang bukan anggota Gereja Katolik Roma.

Sistematika tulisan ini terdiri dari
1 bagian pengantar,
6 bagian pembahasan, dan
1 bagian kesimpulan.

2.

Layaknya artikel opini yang mencukupi kriteria koran lampu merah, tulisan Saudara Nandito yang diterbitkan pada hari terakhir Bulan Maria dan dua hari menjelang Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus berusaha menepuk air di dulang, hingga akhirnya terciprat ke muka sendiri. Dalam tulisan ini, Saudara Nandito merangkai argumentasi yang seronok, duhai berlompatan licin dan mengasyikkan.

Dia menulis begitu lancar, sampai tidak sadar sudah tergelincir dalam penalaran simplistis yang ditandai ungkapan yang amat sinis, walakin tanpa kerangka berpikir yang tertib; tidak berbeda dengan cara berpikir *men in the street* yang tidak mengecap pendidikan universiter. Alhasil, Saudara Nandito menulis laiknya kuda sumba tersepak di rerumputan sabana: begitu nyaring meringkik dengan suara bersipongang melantam angin. Amat disayangkan tulisan seburuk ini sampai terbit dan dibaca orang lain, dengan *Kontekstual* harus merendahkan derajatnya, hanya agar tulisan **buruk** dan **jahat** dimuat.

Saudara Nandito mengawali tulisannya dengan klaim superlatif bahwa rezim Orde Baru (1967–1998) adalah rezim yang paling sering menggunakan Pancasila di dalam setiap manuver kebijakannya. Dalam interpretasi tunggal, Pancasila Orde Baru mengidealkan prototipe sebuah masyarakat harmonis, suatu masyarakat yang tidak menjadikan konflik sebagai katalis perubahan.

Lalu, tanpa ujung pangkal, Saudara Nandito melompat ke pembahasan tentang peran dua orang aktivis politik beragama Katolik, Harry Tjan Silalahi dan Sofjan Wanandi (*sebuah kekeliruan* **fatal** *karena yang berkiprah sebagai aktivis politik adalah kakak sulung Sofjan, yaitu Jusuf Wanandi, yang sehurufpun namanya justru tidak disebut dalam artikel tersebut!*), dengan institusi yang mereka dirikan, CSIS. Saudara Nandito menarik implikasi kedua bahwa triad Harry-Sofjan [*sic!*]-CSIS adalah kelompok dominan yang melegitimasi Orde Baru. Merasa perlu mencantumkan referensi, Saudara Nandito merujuk kepada dua karya akademik, salah satunya buku Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru* (2003).

Memasuki alinea ketiga, maka mulailah orkestrasi akrobat penalaran yang memprihatinkan itu. Bagi Saudara Nandito, peran kelompok Katolik dalam rezimentasi Orde Baru merupakan suatu "teka-teki teologis politis" karena menurutnya, Gereja sebagai "institusi penuh kasih" tidak pantas mendukung, apalagi sampai memberi legitimasi sebuah rezim militeristis. Alinea-alinea sesudah itu lantas mulai mencampuradukkan fakta dengan opini, melumat intan dengan beling, hingga sewaktu ia mencapai klimaksnya, dia bakarlah seluruh ladang gandum untuk membasmi serumpun ilalang.

Tanpa ragu dan seuratpun rasa malu, Saudara Nandito mendesakrasi metafora "Tubuh Kristus" dengan menuding teologi yang dikembangkan Santo Paulus itu adalah dasar golongan Katolik mendukung organisisme dan teori negara integralistik. Mendentam-dentam tuduhannya yang mengutip secara serampangan pemikiran almarhum Daniel Dhakidae, tanpa sumber pembanding yang memadai, bahwa jika teologi "Tubuh Kristus" dikawinkan dengan militerisme, maka senyawa yang dihasilkan adalah "masyarakat dan negara organis" yang, menurut Saudara Nandito, didasari pada "[...] doktrin Ajaran Sosial Gereja yang pertama, *Rerum Novarum*."

Di puncak kebingungannya yang spektakuler, Saudara Nandito lantas meracau, "Visi negara organis katolisisme mempunyai aksentuasi yang kuat terhadap intelektualisme. Sederhananya, untuk menjamin negara sebagai kepala dan perwakilan Kristus, negara itu haruslah dipimpin oleh akal budi. Terjemahan modern terhadap ini adalah *teknokratisme*."

Tanpa tedeng aling-aling, Saudara Nandito memungkasi tulisan buruk itu dengan menyimpulkan bahwa "kelompok Katolik" punya andil merusak masyarakat Indonesia hingga menjadi masyarakat yang kini begitu permisif terhadap politik dinasti dan enggan berkecimpung di dalam bidang politik. Dengan kacak orang tinggi sebenang, Saudara Nandito lantas mengangkat telunjuknya dan memvonis subyek yang dia namakan "kelompok Katolik" melakukan "dosa politik", serta meminta subyek itu menebus dosa dengan, "[....] menyitir istilah Paus Fransiskus, pertobatan politis harus dilakukan!"

Saya tak tahu, sempatkah Bapa Suci Paus Fransiskus, yang sejak masih menjabat Kardinal Buenos Aires telah ribuan kali menjadi korban salah kutip wartawan, membayangkan istilah **pertobatan ekologis** dari dalam *Laudato Si'* (2015) dikorupsi untuk menutup sebuah tulisan buruk yang terbit di media alit di negara berbatas Lautan Teduh sejauh 11 ribu kilometer dari Vatikan?

Karena itu, dengan memohon rahmat Allah supaya Dia membebaskan Saudara Nandito dari kebingungannya, tulisan ini menggarisbawahi lima salah-kaprah dahsyat di dalam satu artikel pendek itu. Perkenankanlah saya, Saudara Nandito, untuk mempergunakan bilangan lima ini, karena ia melambangkan jumlah luka pada tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, dan di lambung Kristus yang tersalib—Tubuh Suci yang Saudara pinjam dan cemarkan sebagai metafora untuk menceritakan pelembagaan sebuah rezim otoriter bernama Orde Baru.

Pertama, Saudara salah kaprah memahami apa yang Saudara maksud sebagai "Katolisisme". Cara menulis Saudara sudah memperlihatkan dengan begitu terang-benderang Saudara memukul rata ungkapan ini dengan istilah "kelompok Katolik", karena Saudara tak memahami perbedaan antara Iman Katolik, institusi Gereja Katolik Roma, dan orang beragama Katolik.

Kedua, Saudara salah kaprah dalam memahami konteks ruang-waktu yang telah memungkinkan orang-orang seperti Harry Tjan (l. 1934) dan Jusuf Wanandi (l. 1937) melaksanakan aktivisme politik mereka di bawah panji-panji Katolik. Sungguh suatu ironi, Saudara menulis tanpa konteks di sebuah media bernama *Kontekstual*.

Ketiga, Saudara salah kaprah memahami dan membaca Ajaran Sosial Gereja, dengan sembarang mengutip judul *Rerum Novarum* dan memerasnya sebagai doktrin induk pemikiran "negara organis". Saudara bahkan keliru meletakkan tarikh 1940–1960-an karena dokumen-dokumen pokok Ajaran Sosial Gereja tidak terbit pada dasawarsa yang Saudara sebutkan.

Keempat, Saudara salah kaprah memahami ungkapan Saudara sendiri, yakni "dosa politik". Bagi negara multikultural seperti Indonesia, ungkapan ini berbahaya karena setiap golongan mempunyai kontribusi dalam *nation-building* yang belum selesai ini. Siapa merasa dirinya layak menilai kontribusi itu sebagai dosa, dan kontribusi lain sebagai amal? Jika seorang Yesus tidak menghukum seorang perempuan yang nyaris kena dirajam sebagai pendosa (Yohanes 8: 9–11), siapakah seorang Nandito Oktaviano menuduh sebuah subyek "kelompok Katolik" telah melakukan "dosa politik"?

Kelima, Saudara salah kaprah memahami kelindan Gereja dan negara, hubungan yang selama seribu tahun pernah mengurung Eropa dalam Abad Kegelapan, hingga tibanya fajarbudi pada abad ke-15. Meski berlalu 5 abad, tetap saja hubungan kedua entitas ini perlu dilakukan dengan hati-hati. Akan tetapi, satu hal yang perlu digarisbawahi, sejarah keterlibatan Gereja Katolik terhadap *nation-building* Negara-Bangsa Indonesia ialah riwayat kemurahan hati yang telah memberi tanpa berharap kembali—pengakuan ksatria yang niscaya tak akan tampak dalam tulisan musang berbulu ayam.

3.

Gereja Katolik Roma sebagai institusi yang telah menghidupkan dan menyebarluaskan ajaran-ajaran Kristus selama dua ribu tahun tidak mengenal istilah –*isme* setelah nama "Katolik", sebagaimana Saudara Nandito memakai istilah "Katolisisme" pada judul tulisannya. Adapun nama "Katolik", yang dicetuskan oleh Ignatius dari Antiokhia, berarti "universal", "menyeluruh", "lengkap". Sebuah Gereja menjadi Katolik karena ada Kristus di dalamnya (KGK art. 830) dan karena mengemban tugas perutusan kepada seluruh umat manusia (KGK art. 831). Dalam melaksanakan tugas itu, Gereja Katolik mengikatkan diri pada suksesi apostolik yang tak terputus sejak Yesus mendirikan Gereja-Nya (Matius 16: 18), dan memercayakan kepemimpinan Gereja kepada Santo Petrus. Sekalipun pernah memiliki kekuasaan politik di Eropa selama seribu tahun, Gereja Katolik tidak merasa perlu membakukan ajarannya menjadi ideologi tersendiri berlabel –*isme* seperti Saudara Nandito menulis "Katolisisme" yang diparalelkan dengan "Pancasila Orde Baru".

Secara institusional, Gereja adalah lambang persatuan yang menjadi cara Allah Bapa memanggil seluruh umat manusia untuk menuju pada Allah, keselamatan sejati dan tujuan akhir setiap orang beriman (*Nostra Aetate* art. 1). Gereja Katolik, dengan iman yang bersumber dari tiga dasar yakni Kitab Suci, Tradisi Suci, dan Kuasa Mengajar atau *Magisterium* (KGK art. 11), mewartakan apa yang diyakini sebagai kebenaran yang berasal dari Allah, yang terwujud melalui berbagai pewahyuan, yang berpuncak pada diri Yesus yang terlahir sebagai manusia: Dia yang menyampaikan kabar sukacita dan keselamatan, dan mengorbankan diri hingga wafat di salib dan bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati. (Yohanes 20: 9).

Dengan dasar iman kepada Yesus yang telah wafat dan telah bangkit setelah mengalahkan maut (1 Korintus 15:17), setiap anggota Gereja Katolik Roma didorong melakukan perbuatan kasih, memelihara pengharapan, dan memohon rahmat tabah menantikan kedatangan Kristus kembali sebagai juru selamat (KGK art. 2854; Wahyu 22: 6-17). Sebagai suatu iman, keyakinan

seperti ini mempunyai sifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat dengan alasan apapun: tidak politis, tidak juga akademis.

Pelembagaan Iman Katolik ke dalam sebuah institusi bernama Gereja Katolik yang terdiri dari anggota-anggota yang beragam mengumpamakan Tubuh Kristus yang tetap utuh sejak Dia hidup, wafat, dan kembali bangkit. Dengan demikian, hanya dalam konteks mengerti hakikat kemanunggalan Yesus dan Gereja-Nya yang berziarah di muka bumi, analogi Tubuh Kristus dapat dipergunakan (KGK art. 787–791).

Analogi Tubuh Kristus tidak sama, dan jelas-jelas tidak dapat dianggap sama untuk memahami kesatuan negara dan rakyat, terutama karena suatu institusi negara bukanlah pelembagaan yang mencerminkan rencana Allah yang Dia laksanakan melalui Yesus.

Dengan realitas seperti itu, dan dengan pernyataan yang asertif bahwa Gereja tidak berusaha menjadikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai bagian doktrin politik, bagaimanakah Gereja memahami dan dapat mendudukkan aktivisme politik yang secara sadar dilakukan oleh kelompok awam anggota Gereja Katolik dengan panji "Katolik" sebagai nama mereka?

Seperti Yesus melakukan pewartaan kabar sukacita di masa kekuasaan Kekaisaran Romawi atas wilayah Galilea, kehadiran Gereja Katolik di sebuah masyarakat selalu berkelindan serta terpaut pada konteks sejarah sosial yang spesifik, tanpa berpretensi bahwa Gereja memilih hadir untuk berkompromi demi memenuhi tuntutan zaman.

Sebaliknya, Gereja Katolik berusaha menyelidiki tanda-tanda zaman dengan diterangi cahaya Injil (*Gaudium et Spes*, art. 4), dan dengan pancaran iman itu, Gereja diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menciptakan persatuan sosial luas dan solidaritas sesama manusia (*Gaudium et Spes*, art. 32). Dengan kata lain, bukanlah Gereja (dan anggota-anggota yang tergabung di dalamnya) yang mencoba menentukan, apalagi berusaha untuk mendikte kenyataan, melainkan sebaliknya. Sikap yang ditempuh maupun pendirian yang dipertahankan oleh Gereja Katolik secara sadar merupakan ***respons***, umpan-balik terhadap tuntutan perkembangan masyarakat yang berlaku secara konkret di setiap zaman.

***

4.

Dalam konteks sejarah sosial di Indonesia, Allah mengutus misionaris Katolik tepat pada tahun-tahun formatif negara-birokratik Hindia Belanda. Diawali dengan karya misi para pastor berkebangsaan Belanda yang mulai melayani kebutuhan umat Katolik di Batavia pada dekade 1800-an, perkembangan karya Gereja Katolik membutuhkan waktu hampir 100 tahun sampai pembaptisan 171 orang Jawa untuk pertama kali di Desa Semagung, Kalibawang, Kulonprogo pada 14 Desember 1904, di sebuah *sendang* (mata air) di bawah pohon angsana atau *sono*. Melalui pembaptisan yang dilakukan Pastor Franciscus Georgius Josephus van Lith, SJ terjadi dua usaha sekaligus: menyebarluaskan ajaran Katolik, sekaligus memulai rencana jangka panjang pengangkatan derajat orang Jawa ke **pemartabatan** manusia (Rijckevorsel, 1952, hal. 50)

Relikui Pembaptisan 171 orang Jawa di Sendangsono, 14 Desember 1904

Gajah dalam ruangan yang harus diperhatikan Gereja Katolik di Hindia Belanda pada masa itu adalah kenyataan bahwa penjajahan Belanda tidaklah berlangsung selamanya, dan karena itu jalan bagi pergerakan kemerdekaan harus disiapkan. Demikianlah, para individu otonom yang terikat kesamaan identitas religius mulai mempergunakan nama "Katolik" sebagai panji-panji gerakan politik yang mengusung cita-cita pemartabatan, yang dimulai dari *Pakempalan Politik Katolik Djawa* yang berdiri pada 1923, dengan salah seorang tokohnya adalah Ignatius Joseph (I.J) Kasimo, pegawai Dinas Pertanian yang mulai merintis karir politiknya sebagai *Volksraad* pada 1931.

Dalam tegak dan rebah, pergerakan politik orang-orang awam Katolik berhasil menyintasi penjajahan dan berhasil memasuki alam kemerdekaan dengan ciri konsistensi sikap politik yang konsekuen. Prinsip konsistensi sikap politik itu selaras dengan ketentuan hukum Gereja yang menyatakan bahwa kaum beriman Kristiani awam mempunyai hak agar dalam perkara-perkara masyarakat duniawi (non-Gerejani), diakui juga kebebasannya, sama seperti hak anggota masyarakat lainnya. Dalam menggunakan kebebasan itu, hendaknya mengusahakan supaya kegiatan mereka **diresapi** semangat Injil, *tetapi hendaknya mereka berhati-hati jangan sampai dalam soal-soal yang masih terbuka untuk mengajukan pendapatnya sendiri sebagai ajaran Gereja* (Kan. 227).

Prinsip ini memiliki implikasi mutlak: aktivisme politik yang dilakukan orang-orang awam Katolik dilakukan dengan usaha memancarkan nilai-nilai Katolik dan dilaksanakan seturut tuntunan dan pedoman integritas Katolik, tetapi **tidak serta-merta** mencerminkan ajaran resmi Gereja Katolik, apalagi teologi Katolik. Artinya, apa yang dikerjakan oleh I.J. Kasimo, F.S. Harjadi, Cl. Soepardjo, dan R.M. Jakob Soedjadi dalam PPKD bukanlah pelaksanaan misi keagamaan, tetapi misi sosial yang mengejawantahkan pengajaran agama Katolik tentang pemartabatan dan kebebasan manusia, melalui jalur politik.

Setelah memasuki alam kemerdekaan secara *de jure* maupun *de facto*, selesaikah gerakan politik Katolik itu? Nyatanya tidak. Permutasi tantangan dalam proses *nation-building* dan ancaman bagi eksistensi Indonesia sebagai Negara-Bangsa merdeka mendatangkan masalah yang berlipat ganda, dan di tengah keadaan itu, tidaklah mungkin orang-orang Katolik yang telah terlibat memperjuangkan jalan menuju kemerdekaan bisa berpangku tangan.

Dalam suasana instabilitas Demokrasi Parlementer tahun 1950-an, kedudukan Partai Katolik yang diketuai oleh I.J. Kasimo serupa partai-partai politik lain yang memperjuangkan aspirasi masing-masing. Meski demikian, di tikungan sejarah ketika Presiden Sukarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 dan mulai berusaha mengikutsertakan Partai Komunis Indonesia ke dalam

kabinet pemerintahan, satu di antara sekian suara minor yang menyatakan penolakan adalah suara Partai Katolik. (Soedarmanta, 2011, hal. 242–243)

Pendirian Kasimo tak jatuh dari langit. Selain masih ingat pengalaman umat Katolik di Cekoslowakia, Polandia, dan Hongaria yang ditindas rezim sosialis satu-partai, Kasimo tidak membenarkan mentalitas politik komunis mencederai demokrasi di Indonesia. Mentalitas ini termasuk sikap menang sendiri, agitasi, infiltrasi, dan membenarkan cara demi tujuan (*aims justify the means*). Melampaui sikapnya sebagai ketua umum Partai Katolik, pendirian Kasimo meresonansikan sikap religius dan ketaatannya pada ajaran Paus Pius XI yang melalui ensiklik *Divini Redemptoris* mengutuk komunisme yang anti-Tuhan dan secara komprehensif menilai komunisme sebagai ajaran, "[....] yang secara intrinsik salah dan supaya orang beriman jangan sampai tertipu dengan bekerja sama untuk memenangkan komunisme di negara mereka. (*Divini Redemptoris* art. 58).

Idealisme tinggallah angan-angan saat menghadapi kenyataan bahwa kekuatan yang dihimpun oleh Partai Komunis Indonesia setelah Pemilihan Umum 1955 terbukti tak dapat dianggap enteng. Militansi aktivitas kelompok komunis yang berkiprah dengan sama gigihnya di tiga tingkat (pusat, daerah, dan akar rumput), menjaring keanggotaan dan simpatisan melalui berbagai organisasi profesi (buruh, tani, pemuda, seniman, cendekiawan, mahasiswa, perempuan, sampai pelajar) berlipat-ganda dari waktu ke waktu. Frans Seda, dalam artikel "Sepanjang Jalan Kenangan" yang dimuat di harian *Kompas*, 28 Juni 1990, mencatat gerak-langkah aktivitas politik komunis saat itu begitu mahir bertindak pada setiap tingkatan, "[....] di atas dia mendukung, di tengah dia menghasut, di bawah dia menyabot!" (Seda, 1990).

Frustrasi sebagai respons organik yang meluas di antara orang-orang yang berusaha mencegah komunisme berkuasa dan mengubah Indonesia menjadi negara totalitarian sosialis satu-partai tidak terelakkan, termasuk di kalangan kelompok Katolik. Di satu sisi, prinsip antikomunisme dirongrong oleh tekanan pemerintah yang membubarkan Partai Madjlis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) dan Partai Sosialis Indonesia, berikut surat-surat kabar dan majalah yang dituding sealiran dengan mereka.

Nasib kedua partai yang antikomunis dan secara prinsipiil menentang Demokrasi Terpimpin yang tidak demokratis telah membenturkan mereka ke dinding kekuasaan sampai hancur berkeping-keping. Itukah jalan yang harus ditempuh Partai Katolik sesudah ini? Di sisi lain, Kasimo tidak ingin Partai Katolik hancur, supaya aspirasi politik dan kepentingan orang-orang Katolik di Indonesia terwakili secara wajar, selain menjaga agar Sukarno tidak benar-benar jatuh dalam pengaruh intrik-intrik politik komunis.

Sukarno melantik Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong (DPR-GR)
(Sumber: Perpustakaan Nasional RI)

Kompromi harus dibuat: antara mengorbankan prinsip dan mengorbankan partai. Ini membuat Kasimo bimbang, sebelum memutuskan bahwa yang harus berkorban adalah dirinya sendiri. Sesudah merenung dan berdoa di Gereja Santo Yusuf di Jalan Bintaran, Yogyakarta, Kasimo memilih mundur dari jabatan ketua umum Partai Katolik dan menyerahkan kepemimpinan partai kepada generasi kader selanjutnya, Franciscus Xaverius "Frans" Seda yang kenal baik karakter Sukarno dan masih dapat menerima Demokrasi Terpimpin. (Soedarmanta, 2011, hal. 254).

Untuk sesaat, Sukarno "menang". Perintah rahasia menggeser Kasimo dari kursi ketua umum berhasil. Partai Katolik kini menghindari konfrontasi, sambil berusaha mencari siasat untuk mempertahankan prinsip. Bagaimana cara agar semua ini dilakukan tanpa memperlihatkan gestur mencurigakan, terutama bagi aktivis politik komunis yang mencoba mencari celah supaya dapat menghancurkan Partai Katolik? Di sinilah peran Biro Dokumentasi, sebuah pusat kajian yang berkantor satu kompleks dengan Sekolah Strada di Jalan Gunung Sahari 88, Jakarta Pusat, sekitar tahun 1962.

Berafiliasi ke Partai Katolik dan dilindungi Madjelis Agung Waligeredja Indonesia, aktivitas Biro Dokumentasi mengumpulkan kliping surat kabar, melakukan analisis, dan menyusun laporan untuk Partai Katolik, sekaligus membuat *database* tentang aktivitas politik komunis berdasarkan kliping dan

analisis. Bahan-bahan yang berhasil mereka peroleh disusun sesuai prinsip-prinsip Partai (berupa ajaran dan moralitas agama Katolik), untuk kemudian dipergunakan sebagai materi argumentasi oleh wakil-wakil Partai Katolik di DPR-GR guna menangkis serangan dari wakil-wakil PKI di sana (Wanandi, 2014, hal. 18–20).

Di lembaga Biro Dokumentasi ini, dua orang muda, Harry Tjan dan Liem Bian Kie, didaku sebagai analis utama. Harry, saat itu belum 30 tahun, adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan telah ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal Partai Katolik. Sementara Liem Bian Kie bekerja sebagai sekretaris Wakil Ketua II Dewan Pertimbangan Agung RI, Soejono Hadinoto. Harry dan Bian Kie dipertemukan melalui keanggotaan mereka pada Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Melalui analisis yang cermat dan kontekstual, temuan observasi Biro Dokumentasi mengarahkan simpulan bahwa PKI mampu mengambil kekuasaan sewaktu-waktu, baik dengan cara memenangkan pemilihan umum maupun dengan kekuatan mobilisasi massa mereka.

"Kami, intelektual dan mahasiswa Katolik, mulai memikirkan cara mempersiapkan diri seandainya dalam lima tahun Indonesia menjadi negara yang dikuasai komunis secara legal dan konstitusional. Sebagai umat Katolik, kami sadar bahwa kami termasuk yang pertama menjadi sasaran regu tembak. Selama ini kami selamat karena Sukarno memerlukan minoritas seperti kami, karena dia menggunakan kami untuk menunjukkan bahwa pemerintahannya bukan komunis. Inilah alasan PKI membenci golongan Katolik."

(Wanandi, 2014, hal. 22)

Dalam keadaan segenting itu, upaya mahasiswa dan intelektual muda Katolik di tengah-tengah ancaman komunisme yang semakin militan untuk mempersiapkan peralihan kekuasaan adalah rasionale yang lebih dari cukup untuk menempa diri sebagai kader. Satu-satunya tokoh yang pada waktu itu mempunyai kapasitas melakukan kaderisasi terstruktur ialah seorang imam Katolik berkebangsaan Belanda: Pater Josephus Gerardus "Joop" van Beek, SJ

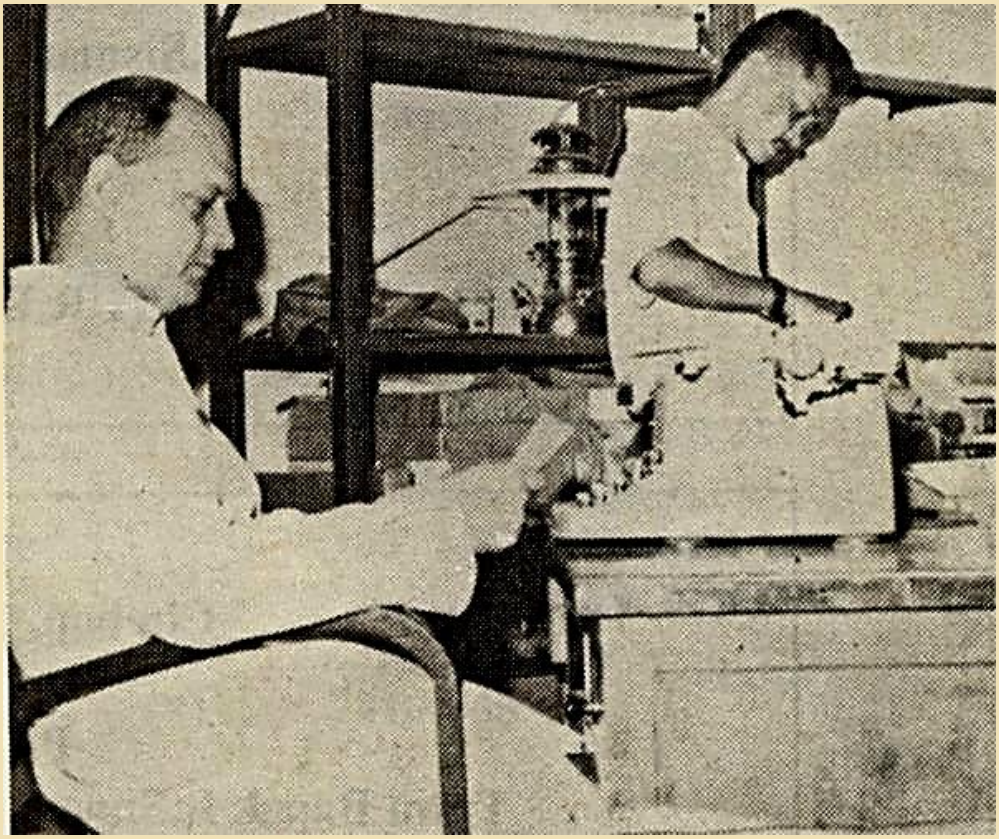

(duduk) Pater Josephus Gerardus "Joop" van Beek, SJ
(Sumber: Istimewa)

Pater Beek lahir di Amsterdam, 12 Maret 1917. Menerima Sakramen Imamat pada 1948, dia mulai berkarya di Indonesia pada 1952, dengan tugas pertama menjadi pamong (*prefect*) sebuah Seminari Menengah Kanisius di Jalan Code, Yogyakarta. Tak sampai setahun bekerja, Pater Beek ditugaskan Provinsial Serikat Jesus membangun sebuah asrama mahasiswa, yang diberi nama Asrama Mahasiswa Realino.

Asrama ini semula diperuntukkan bagi mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Tak hanya menjadi tempat tinggal, Pater Beek juga meletakkan dasar dinamika kehidupan asrama ini dengan melatih mahasiswa penghuni untuk mempunyai keterampilan berorganisasi, cakap berdiskusi, dan *public speaking* (Supriatma, 2016). Dalam kapasitas sebagai pemimpin asrama selama enam tahun itu, Pater Beek menerima tanggung jawab sebagai moderator PMKRI cabang Yogyakarta.

Pada 1959, Pater Beek dipindahtugaskan ke Djakarta dan mendapatkan tugas mengasuh Kongregasi Maria, sebuah perkumpulan spiritual Jesuit yang didedikasikan bagi awam Katolik yang tertarik mendalami latihan spiritual

salah satu pendiri Ordo Serikat Jesus, St. Ignatius Loyola. Perkumpulan yang kemudian dia modifikasi menjadi lebih bercorak "intelektual" ini memberi kesempatan Pater Beek untuk merekrut sarjana, mahasiswa, dan kelompok pekerja usia muda. Sampai di sini, Pater Beek telah mempunyai akses ke PMKRI maupun Pemuda Katolik. Ketiga organisasi tersebut adalah sumber yang melimpah baginya untuk memperoleh kader muda yang dapat dididik dan dilatih menjadi kader yang tangguh, cakap, bersahaja, dan terutama mempunyai loyalitas kepada Pater Beek dan pada Gereja Katolik.

Strategi memimpin 2 organisasi bertumpang-tindih, Kongregasi Maria dan Biro Dokumentasi, adalah cara Pater Beek memastikan konfidensialitas biro hingga sulit untuk dilacak jika dianggap "terlalu politis". Semangat yang dihidupkan Pater Beek melalui lembaga-lembaga yang dipimpinnya itu dia namakan kerasulan intelektual yang terpaut, tetapi tidak berasosiasi langsung pada hierarki Gereja Katolik (Soedarmanta, 2008). Sebagai dua orang muda, Harry dan Bian Kie adalah dua eksemplar hasil pengkaderan tersebut.

Dalam konteks situasi politik yang konfrontatif dan tegang, Pater Beek rutin menggelar diskusi-diskusi di berbagai tempat secara rahasia, dengan dihadiri oleh para kadernya, para pastor, tokoh-tokoh politik Katolik, hingga Uskup Agung Djakarta, Mgr. Adrianus Djajasepoetra, SJ. Melalui diskusi ini, Pater Beek menyampaikan evaluasi terhadap masalah aktual dalam bidang sosial-politik. Dengan cara ini, Pater Beek menyusun jejaring yang mampu mengantarkan analisis politik dari perspektif Katolik hingga ke tingkat elite nasional, tak terkecuali, TNI Angkatan Darat, terutama dua perwira intelijen Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad, yakni Letnan Jenderal Ali Moertopo dan Mayor Jenderal Soedjono Hoemardani.

Setelah percobaan Gerakan 30 September (G30S) gagal, kader-kader Pater Beek adalah yang pertama kali bergerak. Harry Tjan dari Partai Katolik mengajak Subchan Zaenuri Echsan dari Nahdlatul Ulama untuk mendirikan Komando Aksi Pengganjangan (KAP) Gestapu pada 2 Oktober 1965. Selang tiga pekan berikutnya, pada 25 Oktober, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) terbentuk, diketuai oleh Cosmas Batubara, Ketua Presidium PMKRI dan secara *de facto* salah seorang kader Pater Beek. Sejarah mencatat, kedua organisasi ini menjadi salah satu mitra sipil paling andal bagi Angkatan Darat dalam melancarkan pembantaian besar-besaran terhadap simpatisan dan tertuduh anggota Partai Komunis Indonesia (Robinson, 2018). Seakan tidak ingin ketinggalan dalam mengikuti sepak terjang kader-kadernya, Pater Beek menulis sebuah surat panjang yang dialamatkan kepada Sukarno dengan nama samaran "Dadap Waru". Isi surat itu menuntut agar Presiden bersedia membubarkan Partai Komunis Indonesia. (Soedarmanta, 2008).

Secara mendadak, peranan proaktif kader-kader awam Katolik dalam menghalau komunisme membuat sosok-sosok mereka menarik pandangan publik. Pengaruh mereka tersampaikan ke lingkaran satu Jenderal Soeharto. Demikian besar sepak-terjang kader-kader muda ini, seorang wartawan dari *Katholieke Radio Omroep* Belanda, Aad van de Heuvel, bercerita dalam sebuah film dokumenter "The Man Who Remained Unseen". Aad, wartawan muda saat itu, menyaksikan pada suatu sore, sewaktu dia bertamu ke ruang kerja Pater Beek di kantor Biro Dokumentasi, bahwa orang yang dicarinya sedang mengetik. Aad bertanya, apa benar malam itu Soeharto akan diwawancarai stasiun televisi luar negeri. Pater Beek mengiyakan.

"Kira-kira apa yang akan Soeharto katakan nanti?"

"Belum tahu, tetapi saya sedang mengetikkan jawaban yang harus dia ucapkan nanti malam," jawab Pater Beek tenang.

Aad semula mengira Pater Beek bergurau, tetapi saat pidato Soeharto malam hari sama persis dengan naskah ketikan Pater Beek yang dia lihat sore itu, Aad benar-benar tersentak, menyadari betapa besar pengaruh pastor ini hingga menjangkau lingkaran terdekat Soeharto yang ketika itu tengah aktif mengonsolidasi kekuasaannya.

Keterusterangan itu juga mengganggu seorang imam Jesuit lain, Adolf Heuken SJ. Dia merasa keterlibatan Pater Beek itu keterlaluan. Karena itulah, Heuken mengirim surat kepada petinggi Serikat Jesus yang berkedudukan di Roma dan memerinci aktivitas politik yang dilakukan Pater Beek. Menurut Heuken, tidak dapat dibenarkan seorang imam Katolik bekerja sama dengan seorang yang membunuh ratusan ribu orang, karena apapun alasannya, hal itu bertentangan dengan Iman Katolik.

Demikianlah, saat sebuah surat peringatan diturunkan langsung oleh Pater Pedro Aruppe, Superior Jenderal Serikat Jesus yang berkedudukan di Roma, supaya Pater Beek menutup kaderisasinya, ia tunduk. Praktis, semua aktivitasnya di belakang layar Orde Baru selesai. Agaknya, hal ini bukanlah semata-mata karena komunisme berhasil dihalau, melainkan karena kader-kader awam yang dia gembleng telah melaksanakan cita-cita pengkaderan: menjadi tokoh yang berkontribusi dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional, termasuk memastikan Sidang Istimewa MPRS yang menjatuhkan Sukarno berjalan sesuai rencana.

Sepak terjang kader-kader awam Katolik pada masa transisi Orde Baru itu sekilas membenarkan argumentasi Saudara Nandito mengenai pengaruh "kelompok Katolik" dalam rezimentasi Orde Baru. Akan tetapi, tiga catatan dapat ditarik sejauh ini mematahkan pendapat Saudara Nandito secara tegas.

Pertama, subyek yang disebut "kelompok Katolik" itu adalah sejumlah individu otonom yang bertindak dalam kapasitas profesional mereka sebagai intelektual dan mahasiswa, berikut tanggung jawab dan ekspektasi peran mereka dalam kapasitas tersebut.

Artinya, sewaktu mereka berpolitik, mereka tidaklah bertindak karena kapasitas religius sebagai anggota Gereja Katolik Roma, dan tidak berpretensi mengatasnamakan populasi umat beragama Katolik di Indonesia, juga tidak menjustifikasi tindakan mereka dalam pertanggungjawaban religius.

Kedua, apa yang disebut Saudara Nandito sebagai "kelompok Katolik" ternyata merujuk ke sekelompok kader awam yang dibentuk dengan tujuan yang jelas dan konteks yang relevan dengan kondisi iklim politik Indonesia pada masa itu: menghalau komunisme dan mempertahankan demokrasi di ujung tanduk. Seandainya situasi politik tidak seperti itu, dapatlah dipastikan kader-kader itu tidak terbentuk. Sayangnya, sejarah tidak pernah menerima pengandaian di dalamnya.

Ketiga, dan ini yang akan menjadi pengantar memasuki babak kelima, tak seorangpun di antara para kader awam maupun Pater Beek sebagai klerus yang mengasosiasikan praktik menghalau komunisme sebagai Ajaran Sosial Gereja, alih-alih mendukung "masyarakat mengambang" dan menegakkan "negara organis". Mematahkan komunisme adalah suatu tugas nasional yang, terlepas dari apapun latar belakangnya, harus dilaksanakan demi tercapainya cita-cita Revolusi Agustus 1945: Negara-Bangsa yang majemuk, demokratis, dan mempertahankan prinsip di atas politik, bukan politik sebagai panglima.

***

5.

Bagian ini akan membedah salah kaprah ketiga dalam tulisan Saudara Nandito yang berbunyi sebagai berikut:

> "*Sumber ideologis PMKRI adalah Ajaran Sosial Gereja (ASG), yaitu doktrin teologis Gereja Katolik Roma terhadap situasi sosial. Pada masa itu, 1940-1960-an, doktrin utama Gereja muncul dalam ASG yang pertama,* Rerum Novarum."

Terdapat dua kesalahan fatal dalam satu kalimat tersebut. *Pertama*, ASG **bukan** dan **berbeda** dengan "teologi Gereja Katolik Roma". Teologi, sesuai namanya, adalah penyelidikan ilmiah di dalam kapasitas penalaran manusia tentang Tuhan, yang membahas mulai dari pemikiran tentang rencana Allah terhadap manusia, hingga cara manusia untuk menerima kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Sementara itu, Ajaran Sosial Gereja adalah **instrumen** yang disusun dan dipergunakan Gereja yang terpanggil mewartakan Injil dan menghadirkan cinta kasih Allah di tengah jejaring relasi sosial manusia yang serba rumit. Dalam homili misa memperingati 100 Tahun terbitnya ensiklik *Rerum Novarum* pada 1991, Bapa Suci Paus Yohanes Paulus II menyatakan, "Tatkala Injil digemakan kembali melalui Gereja dalam keseharian manusia, ajaran sosial ini adalah perkataan yang membawa kemerdekaan."

Kesalahan *kedua*, Ajaran Sosial Gereja tidaklah muncul sebagai doktrin, melainkan ensiklik, yang tidak diterbitkan pada "1940–1960-an", melainkan jauh sebelum itu. Tidak hanya satu, tetapi tiga dokumen yang berkelindan. Ketiga dokumen tersebut adalah *Rerum Novarum* ("Hal-Hal Baru"), dengan anak judul "Tentang Keadaan Kaum Buruh" yang ditulis Bapa Suci Paus Leo XIII dan diumumkan pada 15 Mei 1891; *Quadragesimo Anno* ("Tahun Keempat Puluh") dengan anak judul "Tentang Rekonstruksi Tatanan Sosial" yang ditulis Bapa Suci Paus Pius XI dan diumumkan pada 15 Mei 1931; dan *Mater et Magistra* ("Ibu dan Guru") dengan anak judul "Tentang Perkembangan-

Perkembangan Terakhir Masalah Sosial dalam Terang Ajaran Kristiani" yang ditulis Bapa Suci Paus Yohanes XXIII dan diumumkan pada 15 Mei 1961. Untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai Ajaran Sosial Gereja, ketiga dokumen tersebut haruslah dibaca secara berurutan, terutama karena *Quadragessimo Anno* dan *Mater et Magistra* yang didasarkan dan ditulis untuk mengamplifikasi amanat *Rerum Novarum* sesuai konteks zaman yang bertransformasi sedemikian dahsyatnya.

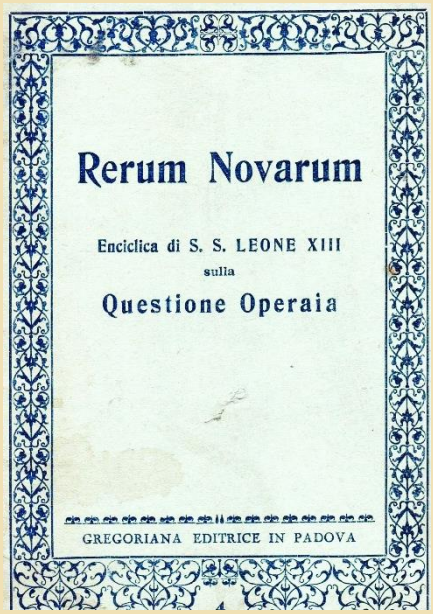

"QUADRAGESIMO ANNO"
La restaurazione dell'Ordine Sociale secondo la Legge Evangelica
GREGORIANA EDITRICE IN PADOVA
N. 7

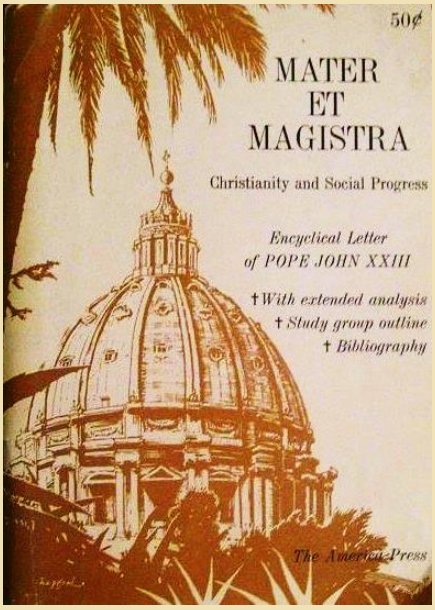

Rerum Novarum disusun sebagai hasil kontemplasi Bapa Suci Leo XIII dalam reksa pastoral yang mengamati perkembangan kondisi kelas pekerja yang tertindas serta menjalani penghidupan yang sangat tak layak, sementara kondisi pemilik modal dapat menikmati hidup bergelimang harta. Keadaan ini, yang menjadi jalan masuk bagi anjuran sosialisme yang konfliktual dan antagonistik, membawa Gereja pada keadaan yang sangat dilematis, karena di satu sisi Gereja terancam oleh doktrin mereka yang menyudutkan Gereja, sedang di sisi lain, kedudukan Gereja dipandang harus mampu mengakhiri konflik dan pertentangan, bukan mengikuti atau menjadi bagian dari konflik kelas tersebut (*Rerum Novarum* art. 16).

Karenanya, ketika pertentangan meruncing dan semakin pahit, Gereja memutuskan menempuh pendirian yang tidak memihak (**bukan** netral!). Dalam ketidakberpihakan itu, Gereja berbicara ke dua kelompok kelas yang selama ini berseteru dan difasilitasi, bukan dilerai, oleh sosialisme yang terus menganjurkan peniadaan kepemilikan pribadi dan meredistribusi kekayaan.

Kepada pemilik kapital, *Rerum Novarum* mengingatkan perolehan yang mereka miliki di dunia adalah semata-mata kemurahan hati Allah. Harta itu bukanlah semata-mata digunakan untuk menyempurnakan dirinya sendiri, tetapi juga demi keuntungan sesama. Tanggung jawab mereka memastikan terciptanya **keadilan** dalam hubungan kerja melalui upah kerja yang mampu menyejahterakan, bukan hanya cukup. Kemampuan yang dibutuhkan oleh orang kaya terutama adalah kemampuan bersikap murah hati (Lukas 6: 36).

Sementara itu, kepada kelas pekerja, yang menurut preskripsi teoretik sosialisme mengalami pengisapan dan dimiskinkan, Gereja merangkul serta menghibur mereka dengan menyatakan bahwa kemiskinan bukan sesuatu yang tak pantas, dan bahwa kewajiban bekerja demi pemenuhan kebutuhan hidup subsisten bukanlah alasan untuk merasa malu. Di atas segala-galanya, Allah tidak pernah menutup diri dan melalui Gereja, telah berusaha untuk menyediakan rasa aman untuk mereka (*Rerum Novarum*, art. 29–31).

Kedudukan Gereja yang tidak memihak memampukan Gereja untuk menyatakan kepada para pemimpin negara bahwa tidaklah pantas dalam sebuah masyarakat, ada kelas sosial yang menderita untuk kelas sosial lain. Memperlakukan kaum kaya dalam derajat yang sama dengan pekerja kerah biru adalah jalan menuju tercapainya kemaslahatan bersama: bonum commune (Rerum Novarum, art. 33–35).

Apakah negara menjadi satu-satunya pihak yang diminta bertanggung jawab? Menurut *Rerum Novarum*, negara jelas berhak mengapresiasi pajak yang ditunaikan kaum kaya, tetapi terhadap kenyataan tentang pengisapan kelas pekerja, negara tidak boleh menutup mata. Otoritas publik dan aturan perundang-undangan dibuat sebagai payung perlindungan yang pertama-tama bertujuan melindungi yang papa dan tak berdaya, karena kaum kaya mempunyai segala cara untuk melindungi dirinya sendiri, sedangkan kaum miskin hanya mampu bersandar pada negara ketika harus mempertahankan hak mereka (art. 36-37) Dengan demikian, jika kelompok-kelompok pekerja berserikat, tujuan utamanya **bukanlah** pertama-tama merebut kepemilikan dari kaum kaya, tetapi mewujudkan perbaikan taraf hidup lewat kerja sama bersendikan solidaritas, mengasah keterampilan, dan memajukan kualitas pribadi lepas pribadi demi kesejahteraan umum (art. 54–58).

Empat dasawarsa sesudah *Rerum Novarum* dikeluarkan, sejarah berjalan dengan akselerasi yang sangat dahsyat. Revolusi industri kedua mencapai puncaknya dengan pembuatan lini produksi. Akumulasi kapital berlangsung secara massif, sementara kondisi kelas pekerja tidak membaik. Komunisme sebagai "jalan pintas" berhasil membuktikan kemampuan mereka, ditandai kemenangan Revolusi Bolsyewik di Rusia pada 1917. Tak lupa, untuk pertama kalinya, dunia menyaksikan perang besar yang berlangsung hingga empat tahun lamanya, diikuti usaha besar-besaran untuk rekonstruksi pascaperang. Bagaimana semangat *Rerum Novarum* dapat menggema dalam pembalikan tatanan yang sudah sedemikian jauh—dan tak terbayangkan sebelumnya?

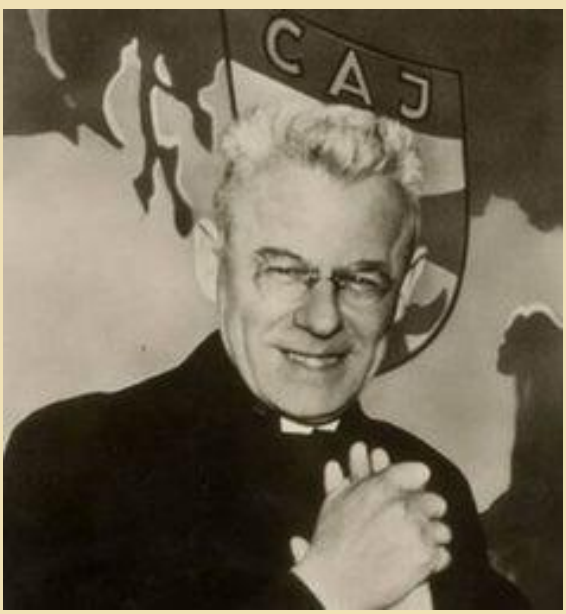

Di tengah badai janji-janji sosialisme, usaha memperbaiki taraf hidup kelas pekerja tanpa melibatkan cara-cara ekstrem telah dipraktikkan, terutama menjembatani ketidaksetaraan dan menutup celah yang dapat dieksploitasi aktivisme sosialis untuk kepentingan mereka. Di Belgia, sebagai contoh, Pastor Joseph Cardijn mengorganisasi serikat pekerja usia muda yang mengembangkan metode SJA, *See-Judge-Act* bernama *Jeunes Ouvrières Chrétiennes*. (JOC).

Metode yang mereka kembangkan berusaha memahami karakteristik komunitas tempat suatu masalah terjadi, sehingga kerangka kerja aktivisme yang dilaksanakan guna mengatasi masalah di komunitas tersebut menjadi spesifik, praktikal, sekaligus menyelesaikan persoalan sampai akar-akarnya. Melampaui cita-cita membangun serikat yang bertendensi sosialis, cita-cita Pastor Cardijn menghendaki agar serikat menjadi sarana *formatio*, yang tidak hanya instrumen memajukan aspirasi dan meningkatkan taraf hidup kelas pekerja, tetapi lebih dari itu, mengadakan reorientasi cara pandang seseorang menjadi solider dan menjunjung keadilan sosial (Cardijn, 1982, hal. 72).

Tujuh tahun setelah Pastor Cardijn merintis serikat yang mengemulasi amanat *Rerum Novarum*, Bapa Suci Paus Pius XI menerbitkan *Quadragesimo Anno* memperingati empat puluh tahun terbitnya ensiklik *Rerum Novarum*. Mengetengahkan keprihatinan yang sama pada realitas sosial dan kondisi pengupahan yang tak layak, *Quadragesimo Anno* menekankan peranan negara dalam porsi lebih besar sebagai penanggung jawab utama untuk keadaan ini.

Dari kedudukan yang semula terpusat, negara dianjurkan menjalankan fungsi subsidiaritas dalam pembinaan kerja sama dan pembentukan asosiasi pekerja. Maksudnya, di dalam hierarki otoritas yang panjang, maka otoritas yang lebih tinggi tak perlu mencampuri urusan otoritas yang lebih rendah dan membiarkan otonomi subordinat itu bekerja optimal. Dengan prinsip subsidiaritas, otoritas sosial menjadi lebih kuat dan terdesentralisasi, sehingga tanggung jawab negara dapat terdistribusi lebih merata, termasuk dalam hal mewujudkan kesejahteraan umum, melalui jalan pengupahan yang pantas dan manusiawi (*Quadragesimo Anno*, art. 80).

Sebagai ensiklik kepausan, *Quadragesimo Anno* adalah suara resmi yang berasal dari dalam Gereja Katolik yang mengecam ekses-ekses pemusatan kekuasaan yang bermuara pada kediktatoran dan totalitarianisme—suatu praktik kekuasaan yang menurut Bapa Suci Paus Pius XI adalah akibat dari konsentrasi modal, kekuasaan politik, dan wewenang pada tangan segelintir orang hingga membangkitkan kembali persaingan bebas dan hukum rimba, yang dalam wujud tertingginya termanifestasi dalam rupa kediktatoran (art. 101–109). Totalitarianisme haruslah dilawan, baik yang berasal dari ideologi kanan (liberalisme dan fasisme) maupun ideologi kiri (sosialisme).

Kedua wujud pemerintahan tersebut bertentangan dengan kebebasan manusia, selain instrumen yang merendahkan derajat kemanusiaan, karena manusia dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan. Gereja tidak dapat mengabaikannya, dan bersikap tegas dalam menghadapi itu. Posisi Gereja tak berubah: sebaik-baik janji sosialisme yang berusaha untuk mewujudkan "keadilan dan persamaan" seseorang tidak mungkin menjadi Katolik yang

baik dan sosialis tulen. Istilah "sosialisme Kristen" menjadi frasa kontradiktif (art. 120). Menurut Bapa Suci Paus Pius XI, satu-satunya jalan mematahkan kecenderungan primordial menumpuk dan melipatgandakan harta ataupun kekuasaan demi meraih supremasi atas orang lain adalah nilai spiritualitas Kekristenan, dengan Gereja harus terlibat sepenuhnya (art. 136–143). Tujuan akhir keterlibatan itu adalah mengembalikan manusia kembali memelihara kebajikan dan memperjuangkan ketahanan nilai-nilai dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di bidang pendidikan maupun keagamaan (art. 147).

Terhadap ketegasan *Quadragesimo Anno* yang tidak menyetujui, bahkan mengecam totalitarianisme, ke mana Saudara Nandito menyembunyikan mukanya, sesudah menuduh Ajaran Sosial Gereja mendiktekan penciptaan "masyarakat dan negara organis", yang tak lain adalah kedok totalitarianisme? Bagaimana mungkin Ajaran Sosial Gereja yang menentang totalitarianisme, mendiktekan penciptaan masyarakat dan negara yang "organis"? Bukankah organisisme sebagai sebuah konstruksi tatanan bernegara, diterjemahkan Prof. Dr. Mr. Soepomo dan dikemukakan dalam Sidang Pertama *Dokuritsu Zyunbi Coosakai* sebagai, "[....] Inilah *idee* totaliter, ide integralistik dari bangsa Indonesia, yang berwujud juga dalam susunan tata negaranya yang asli." (Reeve, 2014, hal. 73; Simanjuntak, 1994). Dapatkah diterima dalam penalaran yang lurus bahwa Ajaran Sosial Gereja yang berusaha memajukan gagasan subsidiaritas, otoritas yang terdesentralisasi, dan mendorong kemandirian, membuka seluang celah bagi gagasan pemusatan kekuasaan seperti ada di pikiran Sukarno, dan kemudian ditentang, karena pemusatan itu hakikatnya membunuh demokrasi?

Tiga puluh tahun sesudah *Quadragesimo Anno*, berarti 70 tahun sesudah *Rerum Novarum*, satu ensiklik kembali diterbitkan, kali ini oleh Bapa Suci Paus Yohanes XXIII, berjudul *Mater et Magistra*. Maksud judul ini jelas: Gereja Katolik harus menjadi ibu dan guru segala bangsa, dan karena itu, kepada Gereja dipercayakan tugas untuk mempertahankan martabat manusia yang menghidupkan secara terus-menerus prinsip-prinsip yang diajarkan Yesus kepada para Rasul. Melalui ensiklik ini, Takhta Suci menghidupkan kembali butir-butir ajaran *Rerum Novarum* di dalam dunia yang berganti rupa: Perang Dunia II, perlombaan senjata, ancaman perang nuklir, berjayanya rezim komunis yang menindas Gereja-Gereja Katolik, sekaligus terbukanya sebuah jalan baru menuju kerja sama antarbangsa.

Masalah-masalah pokok di dalam *Rerum Novarum*, masih menjadi titik pusat perhatian *Mater et Magistra*, dengan penekanan yang tetap tegas agar Gereja memperjuangkan keadilan sosial dan perjuangan memperbaiki taraf

hidup, terutama di negara-negara yang baru melepaskan diri dari belenggu kolonialisme di Asia dan Afrika (*Mater et Magistra*, art. 48). Dengan menyadari kemajuan-kemajuan itu, peran negara menjadi terkonsentrasi untuk tidak hanya menjadi institusi politik, tetapi mencari jalan keluar untuk masalah-masalah sosial dan ekonomi, seraya mempertahankan kemanusiaan dan relasi sosial yang manusiawi, semata-mata agar manusia tidak dipandang menjadi *otomat* yang tidak lagi mengenal arti kemanusiaan (art. 62).

Dibandingkan *Rerum Novarum* maupun *Quadragesimo Anno*, ensiklik *Mater et Magistra* jauh lebih kuat meresonansikan kegentingan-kegentingan zaman itu, baik yang konstan maupun kegentingan kontemporer. Tuntutan untuk negara mengindahkan kepentingan umum; masalah ketenagakerjaan; partisipasi kaum buruh; masalah kaum tani; kerja sama internasional dan prakarsa swasta dalam membina perekonomian; koperasi untuk kaum tani; investasi yang bertujuan membuka lapangan pekerjaan; program bantuan internasional; masalah pertambahan penduduk; kebijakan negara di wilayah pedesaan; hingga pembangunan sarana-prasarana yang layak untuk penghidupan masyarakat di wilayah rural.

Karya-karya sosial ekonomi tersebut baik, dan lebih baik lagi jika umat Katolik terlibat sebagai pemrakarsa dan penggerak karya-karya tersebut (art. 182–184). Satu hal yang jelas, kesinambungan Karya Keselamatan Allah untuk dunia meniscayakan semua orang terlibat dalam pemecahan masalah dan persoalan masyarakat manusia, sehingga kesejahteraan yang dicapai tidak dilakukan dengan mengorbankan golongan lain, merusak alam, maupun mencederai asas-asas moral dan integritas pribadi manusia sebagai citra Allah (art. 205–208).

***

6.

Sementara bagian terdahulu menangkis salah-kaprah Saudara Nandito serta penarikan simpulannya yang telah menuding Ajaran Sosial Gereja yang dalam pemikirannya mengarah pada pembentukan negara organis, bagian ini akan membedah salah-kaprah keempat, yakni tentang apa yang disebut "dosa politik" yang dilakukan "kelompok Katolik". Tuduhan yang tidak tahu malu ini serupa dengan cara penalaran Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, yang menjatuhkan hukuman kolektif terhadap ratusan ribu penduduk Palestina akibat serangan yang dilancarkan militan Hamas pada 7 Oktober 2023. Sangatlah ironis jika *Kontekstual*, media yang lewat publikasinya menunjukkan keberpihakan pada Palestina, justru membiarkan satu orang menulis dengan cara berpikir yang sama sebangun dengan Perdana Menteri Netanyahu itu.

Dengan kerangka berpikir yang sama dengan apa yang tertulis dalam Bab 4, keterlibatan orang-orang awam Katolik dalam konsolidasi Orde Baru tidak berhenti setelah 1965–1966. Secara terus-terang, partisipasi mereka semakin cemerlang sesudah Jenderal Soeharto menggenggam kekuasaan. Dalam kapasitas mereka sebagai politisi maupun intelektual, orang-orang awam Katolik menganggap cita-cita menghalau komunisme bukanlah akhir dari peran mereka di bidang sosial-politik. (Soedarmanta, 2011). Bagi mereka, yang lebih krusial adalah memastikan cita-cita utama Orde Baru terlaksana: pembangunan, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Keyakinan pada integritas Jenderal Soeharto sebagai Presiden tidak tergoyahkan, dan untuk itu, tidak ada alasan untuk tidak mendukung kepemimpinan Soeharto.

Pater Beek mendidik kader-kader awam Katolik untuk menjadi agen yang setiap saat mampu bekerja sebagai *lone-fighter*. Saat negara memanggil, terbukti kader-kader tersebut bergerak otonom dan amat konfidensial. Baru, sesudah 1971, kehadiran mereka menjadi sedikit "tampak". Sebagian kader memasuki Golongan Karya dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagian lagi coba mempertahankan Partai Katolik dan berpolitik dengan identitas Katolik tersebut. Sebagian lagi menjadi pebisnis, industriawan, atau

intelektual. Mereka yang memilih profesi terakhir ada yang menjadi dosen di universitas, ada pula yang mengemulasi cara kerja di Biro Dokumentasi dengan mendirikan sebuah pusat kajian baru. Itulah *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), yang resmi berdiri pada 1 September 1971. Embrio lembaga kajian ini berawal dari perjalanan Jusuf dan Sofjan Wanandi ke Eropa pada 1967, dengan tugas menjelaskan pada mahasiswa Indonesia yang tengah belajar di Eropa Barat tentang Orde Baru dan meminta mereka untuk segera pulang ke tanah air dengan membawa konsep pembangunan yang mereka pelajari di Eropa (Adhi KSP, 2022, hal. 87–88).

Lembaga kajian ini menghimpun kekuatan intelektual yang dinilai perlu untuk mengevaluasi pembangunan Orde Baru. Sementara Harry Tjan dan Jusuf Wanandi mempunyai aktivitas di bidang politik, corak intelektual CSIS dipercayakan kepada para cendekiawan, mulai dari Hadi Soesastro, Soerjanto Poespowardojo, Daoed Joesoef, Soedjati Djiwandono, hingga Clara Joewono. Untuk memperoleh fasilitas dan legitimasi publik, dua Asisten Pribadi Jenderal Soeharto, yakni Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani, diminta kesediaannya menjadi ketua kehormatan, sekaligus pelindung CSIS. Hal ini bukan suatu keanehan, mengingat pusat kajian Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) yang berdiri pada 19 Agustus 1971 juga meminta kesediaan para ekonom dan teknokrat seperti Soemitro Djojohadikoesoemo, Ali Wardhana, Emil Salim, maupun Soehadi Mangkoesoewondo menjadi pelindung dalam yayasan yang memayungi kegiatan intelektual mereka (Karsono, 2013).

Sebagai lembaga pengkaji kebijakan yang membidangi masalah sosial, politik, ekonomi, dan hubungan internasional, CSIS membangun hubungan yang erat dengan pengambil kebijakan di aras nasional. Bahan-bahan hasil kajian, berupa analisis, laporan, memorandum, maupun buku-buku terbitan CSIS dikirimkan sebagai masukan dan rekomendasi tentang masalah aktual yang terjadi di dalam dan luar negeri. Seperti halnya Biro Dokumentasi, kerja-kerja CSIS berkutat pada soal-soal ilmiah dan analisis kebijakan. Tetapi berbeda dengan Biro Dokumentasi, tidak ada intervensi dari hierarki Gereja Katolik maupun kepentingan politik Katolik yang difasilitasi dalam lembaga ini, sekalipun pendiri dan penggeraknya adalah awam Katolik.

Dengan melihat kenyataan bahwa lembaga ini adalah sebuah pusat kajian ilmiah dan melandaskan aktivitasnya pada pengembangan kekuatan nalar, argumentasi apa yang bisa menganggap kerja-kerja CSIS adalah "dosa politik"? Apakah bagi Saudara Nandito, aktivitas menyusun kajian/memberi masukan, terlepas diterima atau tidaknya masukan itu, merupakan sebuah "dosa politik" hanya karena dia diberikan kepada Presiden Soeharto?

Di luar CSIS, aktivitas awam Katolik seperti Harry Tjan, Jusuf Wanandi, Franciscus C. Palaoensoeka, Vincentius Bata da Costa, Al. Soegijanto, atau Leonardus Benjamin Moerdani yang dituduh terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan Operasi Seroja 1975 untuk menginvasi Timor-Timur adalah tanggung jawab mereka sebagai politisi, dan bukan sebagai orang Katolik—apalagi dianggap sebagai tanggung jawab seluruh anggota Gereja Katolik di Indonesia. Dalam hal ini, seluruh aktivitas politik—yang merupakan respons terhadap ancaman komunisme di perbatasan terdekat dengan Indonesia—dapat dibenarkan, tetapi dengan catatan semua itu dilakukan sama sekali di luar pengetahuan otoritas Gereja, dan tidak dapat dikategorikan sebagai suatu aktivitas yang merepresentasikan pendirian Gereja Katolik di Indonesia.

Keseluruhan dari apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh awam Katolik terhadap pembangunan Orde Baru merupakan kontribusi mereka terhadap *nation-building* Negara-Bangsa Indonesia. Tanggung jawab untuk membantu pemerintah ("negara") memajukan dan memperjuangkan keadilan sosial serta kesejahteraan umum adalah implementasi dari Ajaran Sosial Gereja, sekalipun dilakukan di luar sikap keagamaan mereka.

Secara jujur, dapatkah Saudara Nandito menganggap bahwa kebaktian seseorang untuk kemajuan dan pembangunan tanah airnya, di saat yang sama dilakukan untuk menghalau musuh dan menegakkan negara Pancasila, adalah "dosa politik"? Kesalahan penalaran semacam itu, yang kemudian memicu pertanyaan tentang integritas moral, haruslah diakui terlebih dulu sebagai kelemahan yang haruslah dicari jalan keluarnya.

Sikap ksatria dan kejujuran adalah dua di antara watak baik yang harus dimiliki oleh manusia, kapan dan di manapun orang itu hidup dan berkarya. Saudara Nandito mungkin asing dengan kedua sikap tersebut, mengingat tulisan Saudara memperlihatkan sikap tidak ksatria dan tidak jujur, sehingga tulisan ini perlu menggarisbawahi dua peristiwa, yang dengan penyesalan harus disampaikan agar Saudara memahami "dosa politik" yang sebenarnya.

Tahukah Saudara Nandito, sebagai alumni Universitas Hasanuddin bahwa sepelemparan batu dari tempat Saudara mengangsu ilmu, sesudah menunaikan sembahyang Isya pada 1 Oktober 1967, sekelompok mahasiswa dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, yang dari matanya tidak dapat memancarkan kelemahlembutan Nabi Muhammad SAW maupun muruah agama Islam yang *rahmatan-lil-alamin*, membakar 9 gereja Protestan, 4 gereja Katolik, 1 bangunan Asrama Susteran, 1 akademi teologi, 2 bangunan sekolah Katolik, dan 1 bangunan kantor Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia? Gerombolan yang dikomandani oleh Ketua HMI Ujung Pandang,

Jusuf Kalla, memekikkan nama Tuhan saat merusak rumah-rumah beriman menyembah Tuhan (Mujiburrahman, 2006, hal. 38–39).

Tahukah Saudara Nandito, pada 27 Januari 1965, Presiden Sukarno menandatangani keputusan yang memasukkan tindakan penodaan agama sebagai pidana yang dapat diganjar hukuman penjara hingga 5 tahun, untuk mengakomodasi aspirasi pemuka agama Islam (Harsono, 2019, hal. 130)?

Tahukah Saudara bahwa sejak aturan itu menjadi Pasal 156 dan 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ratusan orang dijebloskan ke dalam penjara, mulai dari H.B. Jassin, Arswendo Atmowiloto, hingga Apolinaris Darmawan, hanya karena mengucapkan perkataan yang dinilai secara subjektif menyinggung umat beragama lain?

Tahukah Saudara, sejak sepucuk Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri diterbitkan tanggal 13 September 1969, umat beragama selain Islam harus meminta izin kepada orang-orang Islam saat mendirikan rumah ibadat mereka?

Tahukah Saudara, Soeharto pernah menyatakan, "Musuh kita bersama ialah Islam!" di hadapan I.J. Kasimo, Frans Seda, dan tokoh politik Katolik, ketika mereka diundang jelang Pemilihan Umum 1977? (Jenkins, 2010, hal. 35). Adalah Soeharto, yang saat itu menganggap dirinya sebagai personifikasi Pancasila dalam darah dan daging, yang memperteguh keyakinan itu dengan mematikan hak perdata jenderal-jenderal sebaya yang mengkritiknya dalam Petisi 50, yang menyelewengkan Pancasila—bukan kelompok Katolik seperti Saudara tuduhkan.

Dengan begitu, pertanyaan saya sederhana saja:

Jika tindakan untuk menghalau komunisme dan menegakkan negara Pancasila adalah "dosa politik", dengan apakah Saudara menyebut semua korupsi, vandalisme, dan diskriminasi arogan atas nama Tuhan itu?

***

7.

Sesudah bertungkus-lumus menjelaskan empat salah-kaprah di dalam tulisan Saudara Nandito, bagian ini akan menjelaskan secara ringkas, mengapa dan bagaimana hubungan Gereja dan Negara sepantasnya terjadi. Hal ini dilakukan, karena Saudara Nandito secara jitu memakai istilah semantik kader-kader awam didikan Pater Beek, yakni "garam dunia", untuk menyebut aktivitas mereka yang "mengasinkan" dalam masyarakat, tanpa harus terlihat. Namun, apakah tuntutan "menjadi garam dunia" (bdk. Matius 5: 13) adalah satu-satunya pegangan bagi orang Katolik untuk terlibat dalam kerja-kerja politik?

Secara khusus, anggota-anggota Gereja Katolik dipanggil memenuhi tugas-tugas sebagai warga negara yang berbakti kepada bangsanya, dengan jalan mengabdikan diri di bidang pemerintahan. Hendaknya orang-orang Katolik yang mempunyai kemahiran di bidang politik tidak menolak untuk menjalankan urusan-urusan publik dalam semangat kerasulan (*Apostolicam Actuositatem*, art. 14). Dengan mempromosikan kerasulan awam itu, ajaran-ajaran Gereja menjadi suatu **pegangan moral**, bukan **kompas politik** yang menjadikan setiap orang Katolik berusaha memancarkan "wajah kerahiman Allah" (*Misericordiae Vultus*, art. 8–12). Dengan demikian, hubungan langsung antara Gereja dan Negara tidak pernah ada, secara khusus dalam konteks di Indonesia. Yang ada adalah hubungan orang-orang Katolik menjalankan kerasulan mereka di bidang politik, meski sebagian besar tanpa menyertakan keanggotaan mereka dalam Gereja Katolik sebagai latar belakang.

Suara Gereja Katolik bergema agar ajaran Iman yang menuntut setiap orang berusaha untuk *memberi lebih*, seperti Yesus memerintahkan memberi kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan memberikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Kepada Kaisar ("negara"), pemberian tidak selalu pajak, tetapi juga sumbangsih dan pemikiran. Batas-batas untuk memastikan kedua institusi tak mencampuri termaktub di dalam dokumen Gereja, tetapi yang lebih penting adalah sikap hati dan integritas dalam mendatangkan Kerajaan Allah di atas bumi seperti di dalam surga (Matius 6: 10).

8.

Sejarah *nation-building* Negara-Bangsa Indonesia telah mencatat kisah-kisah para pengikut Yesus dalam melaksanakan perutusannya; sebagai awam Katolik yang hidup, berkarya, serta dituntut untuk merasul, di tengah-tengah jutaan orang bukan Katolik. Tidak mulus perjalanan mereka, dan dalam kerapuhan yang manusiawi, kesalahan bertindak seringkali tidaklah mereka temukan sendiri, hingga harus diperlihatkan orang lain. Namun, kesalahan itu tidak serta-merta menunjukkan mereka adalah "orang jahat bernasib baik" yang dilindungi ketiak kekuasaan untuk mendapatkan insentif tertentu. Kita menilai baik-buruk tindakan seseorang dari dampak ditimbulkannya, tetapi dengan apa kita mampu menilai ketulusan seseorang menempuh jalan hidup yang dia yakini ditunjukkan Tuhan kepadanya?

Iman Katolik mengenal pengampunan—sifat Allah yang Dia berikan dalam diri setiap manusia. Dalam pengampunan itu, kesalahan dihapuskan sama sekali, sehingga seseorang dapat mencapai perasaan damai. Karenanya, mengakhiri apologetika ini, saya memohon kepada Allah mengaruniakan pengampunan pada Saudara Nandito—pengampunan yang membebaskan Saudara dari semua prasangka.

Tanggung jawab seseorang untuk menuliskan sebuah pembelaan, yang dilakukan penulis apologetika ini, lebih dari pertanggungjawaban terhadap sejarah, tetapi juga terhadap iman yang diyakini dan terhadap ajaran Gereja yang diterima dan dilaksanakannya. Di atas batu karang, Yesus mendirikan Gereja-Nya. Dari atas batu karang itu juga, apologetika ini menyerang dan membantah, menjelaskan dan meluruskan. Tetapi kata akhir tidak terletak pada penulis atau pembaca, tetapi pada Allah sendiri: Dia yang menyelidiki hati dan menguji batin, yang kelak memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah-langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya (Yeremia 17: 10)!

Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus
Minggu, 02 Juni 2024, 17.24 GMT+7

Glosarium

1 Korintus	**Surat Pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus**
apostolik	berhubungan dengan kerasulan
Apostolicam A.	dokumen dekret hasil Konsili Vatikan II yang diresmikan pada 18 November 1965. Mengatur prinsip-prinsip dan tatacara kerasulan awam.
art.	singkatan **artikel** (pasal), nomor penjelasan yang mengacu pada satu pembahasan spesifik dalam dokumen Gereja
awam	golongan orang dalam Gereja Katolik yang tidak menerima Sakramen Imamat dan tidak mengucapkan kaul.
biarawan	golongan orang dalam Gereja Katolik yang mengucap kaul ketaatan, kemiskinan, dan kemurnian, tergabung di sebuah komunitas hidup bakti dengan spiritualitas khusus, serta berkarya di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan. Mereka dipanggil dengan sapaan suster atau bruder
bdk.	singkatan **bandingkan**, metode merujuk langsung pada ayat Kitab Suci yang dimaksud
Bulan Maria	bulan yang didedikasikan secara khusus oleh Gereja Katolik Roma untuk melakukan devosi kepada Santa Perawan Maria
Divini R.	ensiklik yang dikeluarkan oleh Bapa Suci Paus Pius XI pada 19 Maret 1937, yang menjelaskan pendirian resmi Gereja Katolik terhadap komunisme ateistik.
ensiklik	surat edaran yang diterbitkan oleh Takhta Suci yang seringkali dirujuk sebagai pendirian resmi Gereja Katolik mengenai suatu permasalahan.
Gaudium et S.	dokumen konstitusi hasil Konsili Vatikan II yang diresmikan pada 07 Desember 1965. Mengatur pembaruan tata pastoral dalam Gereja.
Kan.	**Kitab Hukum Kanonik**, dokumen resmi yang mengatur hukum-hukum dalam institusi Gereja Katolik
KGK	**Katekismus Gereja Katolik**
klerus	golongan orang dalam Gereja Katolik yang telah menerima Sakramen Imamat dan ditahbiskan untuk menjalankan tugas penggembalaan umat. Mereka dipanggil dengan sapaan pastor/pater/romo

Laudato Si'	ensiklik yang dikeluarkan Bapa Suci Paus Fransiskus pada 18 Juni 2015. Menjelaskan pendirian Gereja Katolik terhadap keadaan dan masa depan Planet Bumi
Lukas	**Injil Lukas**, bagian ke-3 dalam Alkitab Perjanjian Baru
Matius	**Injil Matius**, bagian ke-1 dalam Alkitab Perjanjian Baru
Miserico. V.	dokumen *bulla* yang dikeluarkan Paus Fransiskus pada 11 April 2015, berisi tentang maklumat pembukaan Tahun Suci Luar Biasa Kerahiman Allah yang berlangsung selama satu tahun 2016
moderator	imam yang bertugas sebagai penasihat dalam struktur PMKRI
Nostra Aetate	dokumen pernyataan hasil Konsili Vatikan II yang diresmikan pada 28 Oktober 1965. Mengatur hubungan dan pendirian Gereja Katolik dengan agama-agama bukan Kristen
pamong	imam/biarawan yang bertugas di sebuah lembaga pendidikan Katolik, dan bertugas mengurus kedisiplinan siswa di lembaga tersebut
pembaptisan	sakramen yang diterimakan dalam upacara pencurahan air ke dahi yang menandai penerimaan seseorang terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat
reksa pastoral	tugas penggembalaan umat yang dipercayakan kepada seorang pastor
Serikat Jesus	disingkat **SJ**, tarekat agama Katolik yang didirikan Ignatius Loyola, Fransiskus Xaverius, Alfonso Salmeron, Simao Rodriguez, Peter Faber, Diego Lainez, dan Nicolas Bobadilla pada 27 September 1540
Tradisi Suci	seperangkat ajaran dan tradisi yang dipraktikkan 12 Murid Yesus, diajarkan generasi ke generasi dalam melaksanakan karya kerasulan
Wahyu	**Wahyu kepada Yohanes**, bagian ke-27 dalam Alkitab Perjanjian Baru
Yeremia	**Nubuat kepada Nabi Yeremia**, bagian ke-24 dalam Alkitab Perjanjian Lama
Yesaya	**Nubuat kepada Nabi Yesaya**, bagian ke-23 dalam Alkitab Perjanjian Lama
Yohanes	**Injil Yohanes**, bagian ke-4 dalam Alkitab Perjanjian Baru

Daftar Pustaka

Adhi KSP, Robert. *Sofjan Wanandi dan Tujuh Presiden*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022

Cardijn, Joseph C. *La Pensée de Joseph Cardijn, va Libérer mon Peuple!*. Brussels: Vanbraekel Mouscron, 1982

Harsono, Andreas. *Race, Islam, and Power: Ethnic and Religious Violence in Post-Suharto Indonesia*. Clayton: Monash University Press, 2019

Jenkins, David. *Soeharto & Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer Indonesia 1975–1983*. Depok: Komunitas Bambu, 2010

Karsono, Sony. "Indonesia's New Order 1966 – 1998: Its Social and Intellectual Origins." Disertasi Ph.D. Athens: Ohio University, 2013

Mujiburrahman. "Feeling Threatened. Muslim-Christian relations in Indonesia's New Order." Disertasi Ph.D. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006

Reeve, David. *GOLKAR Sejarah yang Hilang: Akar Pemikiran & Dinamika*. Depok: Komunitas Bambu, 2014

Robinson, Geoffrey B. *Musim Menjagal: Sejarah Pembunuhan Massal di Indonesia 1965-1966*. Depok: Komunitas Bambu, 2018

Seda, Frans. "Sepanjang Jalan Kenangan." dalam rubrik *Opini* harian *Kompas*, 28 Juni 1990

Simanjuntak, Marsillam. *Pandangan Negara Integralistik*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994

Soedarmanta, J.B. *Pater Beek, SJ: Larut Tetapi Tidak Hanyut*. Jakarta: OBOR, 2008

Soedarmanta, J.B. *Politik Bermartabat: Biografi I.J. Kasimo*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011

Supriatma, Made. "Kamerad dalam Keyakinan: Pater Joop Beek dan Jaringan BA Santamaria di Asia Tenggara." *Harian IndoProgress*. Diakses 01 Juni 2024. https://indoprogress.com/2016/09/kamerad-dalam-keyakinan-pater-joop-beek-sj-dan-jaringan-ba-santamaria-di-asia-tenggara/

van Rijckevorsel, Leopoldus. *Pastoor F. van Lith, SJ*. Nijmegen: Uitgave St. Claverbond, 1952

Wanandi, Jusuf. *Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965–1998*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014